

MENGENAL WHITE COLLAR CRIME

Oleh
Sigid Riyanto, SH.

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 1939 Shuterland mengungkapkan istilah White Collar Crime. Beliau memberikan batasan White Collar Crime yang dikutip oleh J. Vander Heuvel adalah sebagai berikut: "White Collar Crime as a crime committed by a person of respectability and high social status of his occupation" (J. Vander Heuvel, 1989:2). Menurut Edelhertz yang dikutip oleh Boy Mardjono Reksodiputro dalam salah satu makalahnya disebutkan bahwa, White Collar Crime adalah sebagai tindakan illegal atau serangkaian tindakan illegal yang dilakukan dengan cara-cara non-fisik dan dengan menyembunyikan atau tipu muslihat untuk mendapatkan uang ataupun harta benda dan untuk mendapatkan manfaat perorangan dalam dunia usaha. White Collar Crime terdiri atas dua tipe yaitu okupasional dan badan hukum. Kejahatan dilakukan sebagian besar oleh individu-individu sehubungan dengan okupasi mereka (Reksodiputro, 1989:8). Soerjono Soekanto merumuskan White Collar Crime itu adalah kejahatan kelas tinggi atau kejahatan kelas kakap, dan is-

tilah White Collar Crime diintrodusir oleh kriminolog di dalam rangka memperkenalkan suatu klasifikasi tipe-tipe penjahat atas dasar perbuatan jahatnya (Soekanto, 1986:186).

Berdasarkan beberapa rumusan di atas dapat kita ketahui, bahwa White Collar Crime adalah kejahatan kelas tinggi yang dilakukan dengan cara-cara non-fisik. Penjahatnya bukanlah orang-orang biasa tetapi orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan tertentu yang mempunyai status sosial yang tinggi dalam masyarakat atau dapat pula dilakukan oleh Suatu Badan Hukum. Timbulnya White Collar Crime itu, oleh karena situasi sosial yang memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat luas. Akibat dari kejahatan tersebut, warga masyarakat akan tidak mempercayai lagi nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, warga masyarakat akan acuh dan apatis.

Biasanya kejahatan yang dilakukan oleh golongan intelektual itu sangat rapi dan halus sekali, obyek yang akan dikerjakan sudah direncanakan dengan rapi dan dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk mendeteksi/menye-

lidiki, bahwa disalah satu instansi telah terjadi tindak pidana yang menyangkut jabatan. Menurut Bambang Poernomo kejahatan yang menyangkut jabatan (korupsi) secara teoritis dapat dilakukan secara tersembunyi dan mempunyai sifat mengembangkan menjadi perilaku korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan negara dan masyarakat. Bahkan perbuatan korupsi pada tingkat kematangannya sanggup untuk memperkosa pembentukan UU dan mengacaukan strategi penegakan hukum. (Poernomo, 1984:67).

Anggota masyarakat yang dikatakan mempunyai status sosial tinggi (high class) antara lain para pengusaha-pengusaha, pejabat-pejabat. Mereka menjalankan peranannya dalam kerangka kedudukannya dan keuangan yang kuat, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang oleh hukum dan masyarakat dikualifisir sebagai kejahatan. Hal lain bahwa "golongan intelektual kadangkala menganggap dirinya kebal hukum. Dengan sarana-sarana pengendalian sosial lainnya, karena kekuasaan dan keuangan yang kuat padanya itu, sukar untuk memidana mereka" (Soekanto, 1986:167).

Karena kekuasaan dan uang dianggap sangat besar pengaruhnya terhadap kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, seolah-olah kekuasaan itu lebih tinggi artinya dari hukum, sehingga kepastian hukum sulit dicapai dan selanjutnya akan terdengar, bahwa hukum hanya berlaku bagi orang-orang yang

tidak mempunyai kekuasaan dan uang. Hal tersebut juga merupakan salah satu akibat dari masalah White Collar Crime. Menurut Frans Magnis-Suseno "sebenarnya kekuasaan pada pokoknya hanya benar dan baik sejauh berjalan dalam batas-batas hukum yang persis, sedangkan hukum sendiri harus menunjang tujuan negara, yaitu mengusahakan kesejahteraan umum dan bukan kepentingan pribadi penguasa sendiri atau kelompok-kelompok tertentu" (Magnis-Suseno, 1986:6).

Kepastian hukum akan terwujud apabila aparat penegak hukum itu betul-betul menjalankan ketentuan-ketentuan hukum, dalam menerapkan hukum pidana secara sungguh-sungguh dan harus dikenakan sanksi terhadap siapapun yang melanggar. Untuk itu para penegak hukum harus memiliki mental yang baik dan tangguh terhadap pengaruh sosial dan lingkungannya.

White Collar Crime oleh para ahli dianggap sebagai tipe kejahatan yang bersangkutan paut dengan suatu eksese dari proses perkembangan ekonomi atau material yang cepat. Gejala ini dinamakan Business Crime atau Economic Criminality. Begitu pula seperti yang pernah dihebohkan mengenai komersialisasi jabatan.

White Collar Crime sangat luas ruang lingkungannya, bahkan akan selalu bertambah sejalan dengan kemajuan jaman dan teknologi. White Collar Crime dapat meliputi tindak pidana korupsi, kejahatan yang di-

lakukan oleh suatu Korporasi, pembajakan pesawat, kejahatan perang, penggulingan kekuasaan yang syah serta kejahatan yang menggunakan perlengkapan computer.

Seperti yang telah penulis paparkan di atas, bahwa White Collar Crime mempunyai ruang lingkup yang luas dan bisa berkembang. Oleh karena itu permasalahan White Collar Crime juga luas dan semakin berkembang, akan tetapi pada tulisan ini penulis akan menjelaskan terhadap permasalahan:

- A. Apakah unsur-unsur White Collar Crime?
- B. Bagaimanakah bentuk-bentuk dari White Collar Crime?
- C. Faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan White Collar Crime?

Apakah unsur-unsur White Collar Crime sama saja dengan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya atau ada perbedaan yang sangat prinsipil. Dalam bentuk kejahatan apa saja White Collar Crime tersebut, apakah terdapat bentuk-bentuk yang khusus. Ada berapa faktor yang menyebabkan timbulnya White Collar Crime dan faktor apa saja yang dominan. Pengaruh apa yang timbul terhadap negara dan bangsa sehubungan dengan White Collar Crime.

II. PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur White Collar Crime

Unsur-unsur White Collar Crime adalah:

- a. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Merugikan masyarakat dan atau Negara.
- c. Dilarang oleh aturan hukum pidana.
- d. Perbuatannya diancam dengan pidana.
- e. Dilakukan oleh orang-orang tertentu.

Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, artinya perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak hanya merugikan perorangan atau sekelompok kecil saja, tetapi dapat merugikan masyarakat luas baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan atau dapat merugikan keuangan Negara. Perbuatan itu dilarang oleh hukum pidana serta atas perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana dan pelakunya adalah termasuk ke dalam golongan intelektual.

Sebagai contohnya adalah kasus korupsi proyek PRPTE pada Kantor Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Jambi. Putusan perkara Nomor 18/Pid/B/1984/PNJBI, tanggal 8 Nopember 1984. Terdakwa adalah Wakil Pimpinan Proyek PRPTE. Terdakwa sebagai pegawai Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Jambi. Terdakwa telah menggunakan uang negara (uang proyek) untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp 103.800.000,- (seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa telah melakukan tindak

pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa karena kesalahannya tersebut dijatuhi hukuman (dihukum) pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbedaan utama antara White Collar Crime dengan tindak pidana biasa antara lain terletak pada pelakunya dan penggunaan atas harta hasil kejahatan yang dilakukan serta cara kerjanya. Pelaku pada kejahatan yang tergolong White Collar Crime adalah dilakukan oleh orang yang tergolong intelektual dan terkait dengan pengaruh kekuasaan, jabatan serta keuangan dan dengan pengaruh tersebut lantas mereka beranggapan, bahwa diri mereka kebal terhadap hukum dan cemooh masyarakat. Pada tindak pidana biasa, pelakunya tidak tergolong kelompok intelektual. Mereka termasuk orang kebanyakan yang tidak memiliki jabatan tertentu dalam pemerintahan maupun dalam suatu Badan Usaha. Penggunaan hasil kejahatan yang termasuk White Collar Crime biasanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti membeli mobil mewah, rumah mewah, membeli barang-barang lux, investasi tanah, disimpan di Bank dalam Negeri maupun di Luar Negeri, dan lain-lain. Sedang pada kejahatan biasa hasil kejahatan yang diperoleh biasanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti

makan, minum, memenuhi kebutuhan sex serta untuk memenuhi kebutuhan biologis lainnya. Cara kerja pada White Collar Crime biasanya dilakukan sangat rapi dan halus sekali sehingga para penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk mendeteksi/menyelidiki secara dini, bahkan kadang-kadang ditemukan/diketahui kalau terjadi penyelewengan setelah pejabat/pegawai yang bersangkutan tidak lagi menjabat atau pensiun.

B. Bentuk-bentuk White Collar Crime

Ada berbagai bentuk White Collar Crime, berdasarkan pengertian mengenai White Collar Crime di atas, yaitu suatu kejahatan atau tindakan illegal yang dilakukan oleh individu-individu yang intelek sehubungan dengan jabatan/kedudukan atau oleh suatu Badan Hukum yang mempunyai kekuatan keuangan yang sangat kuat. Bentuk White Collar Crime akan dapat meliputi bidang Ipoleksosbudhankam, (bidang Idiologi, Politik Sosial budaya, dan pertahanan keamanan). Oleh karena itu White Collar Crime mempunyai tujuan tertentu yang sangat besar serta dapat merusak kehidupan bangsa dan negara. Misalnya ada golongan intelektual yang berkeinginan merubah Idiologi negara, berpolitik memaksakan kehendak yang tidak sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan, menggelapkan uang negara (korupsi), menyelundupkan barang-barang terlarang, menjual dokumen negara

(spionase), mengadakan acara atau pesta-pesta yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang baik.

Sebagai contoh bentuk kejahatan yang dilakukan oleh golongan intelektual akan dipaparkan dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Pemalsuan Surat.
- b. Korupsi.
- c. Penyuapan.

Tiga bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh golongan intelektual di atas dapat dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan teman sejawatnya ataupun teman seprofesinya.

ad. a. Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan surat diatur dalam KUHP mulai pasal 263 s/d pasal 276. Pasal 263 (1) KUHP menyebutkan, bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu, diancam, jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Sebagai contoh, misalnya ada seorang pejabat di salah satu Bank yang ingin membobol uang milik seorang nasabah yang disimpan di Bank di mana pejabat tersebut be-

kerja. Untuk memudahkan usahanya pejabat tersebut memerintah kepada orang lain agar membuka rekening di salah satu bank kemudian mencetak Bilyet Giro palsu yaitu dengan memalsukan tanda tangan nasabah pemilik uang serta mengisi nomer Bilyet Giro nasabah pemilik uang. Melalui Bilyet Giro palsu kemudian uang milik nasabah yang tersimpan dikliringkan di Bank di mana orang diajak bekerja sama membuka rekening.

ad. b. Korupsi

Kejahatan Korupsi diatur dalam UU No. 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Adapun yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 undang-undang tersebut. Salah satu contoh misalnya yang disebutkan dalam pasal 1 (1) sub b yang selengkapya berbunyi barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Atas pelanggaran pasal 1 (1) sub b tersebut pelakunya dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah. Selain itu dapat dijatuhkan hukuman tambahan yang berupa perampasan barang yang

merupakan hasil kejahatan korupsi serta membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (pasal 28 yo. pasal 34 sub a,b,c, UU No. 3 tahun 1971).

Sebagai contoh, misalnya ada seorang pejabat yang ditunjuk sebagai pimpinan proyek pembangunan gedung di lingkungan kantornya dalam menjalankan pekerjaannya pejabat tersebut tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Atas jabatan/kedudukan yang dipercayakan padanya pejabat tersebut memerintahkan merubah/mengganti barang yang digunakan dengan barang lain yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dalam rencana pembangunan, sehingga hasilnya lebih jelek, di samping itu pejabat tersebut juga membuat kuitansi fiktif serta membebaskan kepada anggaran kantor untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

ad. c. Penyuapan

Penyuapan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Pada pasal duanya disebutkan, Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu dengan seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang lain itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangannya atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan hu-

kuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pada pasal tiganya disebutkan, barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangannya atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun atau denda Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Misalnya pada suatu pertandingan sepak bola antara kesebelasan Indonesia dengan kesebelasan negara lain. Dalam pertandingan ternyata terjadi keganjilan, oleh sebab itu pengurus atau pemainnya diduga keras telah terjadi perbuatan curang. Dalam hal ini apabila dugaan tersebut benar maka pengurus maupun pemain dapat dikenakan tindak pidana suap. Dalam contoh lain misalnya ada seorang hakim yang sengaja tidak mau mengungkapkan suatu alat bukti lain, selain yang telah diajukan oleh salah satu pihak, yang sebetulnya alat bukti itu merupakan kunci untuk mengungkapkan kebenaran dari peristiwa. Ketidakmauan oknum Hakim tersebut dikarenakan oleh adanya suatu faktor X yang mempengaruhinya. Akhir dari putusan Hakim tersebut oleh pencari keadilan dirasakan sangat tidak adil.

Suatu contoh lain adalah sebagai mana yang dipaparkan oleh seorang staf Kepolisian RI dalam suatu makalahnya yang berjudul Tindak Pidana di Bidang Perbankan waktu seminar di UNDIP Semarang, 1989 dikatakan: Akibat faktor pengetahuan, teknologi, keberanian dan kesempatan yang tersedia, mendorong seseorang untuk melakukan White Collar Crime dengan memilih Bank sebagai sasarannya, karena dengan memilih Bank sebagai sasaran penjahat akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan resiko yang sangat relatif kecil (Direktorat Reserse Polri Sub Direktorat Reserse Ekonomi, 1989:2).

Menurut catatan yang disebutkan oleh Kolonel Polisi Drs. Moh. Suwardja dalam suatu makalahnya, jumlah seluruh tindak pidana di bidang perbankan yang penyidikan nya dilakukan oleh Sub Direktorat Reserse Ekonomi dari tahun 1986 sampai dengan bulan September 1989 adalah mencapai 115 perkara, dengan jumlah kerugian meliputi Rp 79.758.943.652,78,-, US\$ 10.297.395.71,4.905.370 YEN, 10.000 D. Mark dan 1 kg Emas.

Para pelaku tindak pidana perbankan pada mulanya hanya dilakukan oleh perseorangan, namun perkembangannya dilakukan dengan melibatkan para pejabat Bank, merupakan suatu sindikat yang terorganisir secara baik, melibatkan pelaku di luar negeri sebagai tempat untuk menampung hasil kejahatan, mempergunakan identitas palsu seperti KTP, Paspor dan lain-

lain, warkat Bank dicetak sendiri atau kerjasama dengan oknum percetakan di mana warkat tersebut dicetak.

Beberapa kasus di bidang Perbankan di atas antara lain adalah, kasus pemalsuan cek pada instansi T pada Bank BN cabang Senayan Jakarta sebesar Rp 34.289.000,-. Kasus pemalsuan bilyet giro Bank I Jakarta sebesar Rp 781.842.000,-. Kasus pemalsuan telex transfer Bank B cabang Jakarta Kota sebesar US\$ 250.000.00,-. Kasus inkaso Banker's draft fiktif di Bank R dengan nominal US.\$ 325.000.00.

C. Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan White Collar Crime

Salah satu kejahatan yang tergolong ke dalam White Collar Crime adalah tindak pidana korupsi.

Menurut Prof. Dr. Baharudin Lopa yang ditulis dalam Harian Pos Kota pada tanggal 8-9-1987 hal 2 disebutkan bahwa sebagai faktor penyebab dimungkinkannya tindak pidana korupsi di Indonesia ada 11 (sebelas) faktor penyebabnya, yaitu:

1. Kerusakan moral.
2. Kelemahan sistem (management).
3. Kerawan kondisi sosial ekonomi.
4. Tindakan hukum yang belum tegas.
5. Seringnya para pejabat meminta sumbangan kepada para pengusaha.
6. Pungutan liar.
7. Kekurangan pengertian tentang

tindak pidana korupsi.

8. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang serba tertutup.
9. Masih perlunya mekanisme kontrol DPR.
10. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada.
11. Gabungan dari berbagai faktor yang juga menyebabkan terjadinya perbuatan korupsi.

Berdasarkan dari berbagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat penulis pada dewasa ini adalah, faktor kerusakan moral dan faktor kerawanan kondisi sosial ekonomi. Kerusakan moral dan kerawanan sosial ekonomi itu, dapat menyebabkan sebagian dari golongan intelektual melakukan kejahatan dengan memanfaatkan peluang-peluang dan kesempatan yang ada sehubungan dengan kedudukan dan kewenangannya. Misalnya, dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada, serta kerusakan moral pelaku maka golongan intelektual itu melakukan penyelewengan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, melakukan manipulasi dalam pengeluaran anggaran atas dana yang ada atau dengan membuat bukti fiktif. Mengadakan transaksi dengan para pengusaha/kontraktor untuk mendapatkan komisi yang besar. Dengan adanya komisi yang besar, maka pengawasan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan juga asal jadi atau tidak

menurut standart yang telah ditentukan. Sebagai akibatnya negara sangat dirugikan oleh ulah oknum tersebut.

Orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat atau orang-orang yang mempunyai kedudukan/jabatan dalam suatu instansi perbankan, badan-badan usaha milik pemerintah maupun swasta termasuk para pengusaha-pengusaha besar, tidak sedikit yang telah terlibat dalam kejahatan, dengan kekuasaan/jabatan yang mereka miliki serta ditopang oleh keuangan yang memadai, mereka beranggapan, bahwa dirinya kebal hukum dan seolah-olah apa yang dilakukan selalu benar. Hal itu nampak sekali dengan banyaknya orang-orang tertentu yang menggunakan backing serta menjadi backing dalam suatu urusan tertentu, di samping itu tidak sedikit kasus-kasus korupsi yang diketemukan setelah pejabat yang bersangkutan tidak lagi melakukan jabatannya (baik karena pensiun, pindah tempat maupun dikarenakan telah habis masa jabatannya).

Golongan intelektual yang melakukan kejahatan itu didorong oleh keinginan untuk memenuhi kehidupan sekunder, hidup mewah serta barang kali ada yang menggunakan kesempatan (dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah "aji mumpung"). Sebagai contoh misalnya, untuk membeli mobil mewah, rumah mewah dengan segala perlengkapan yang komplit, hidup berfoya-foya, berambisi untuk membeli

tanah, berambisi untuk menginfestasikan uang sebanyak-banyaknya demi masa depan keluarga, dan lain-lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istimewa tersebut, mereka tidak segan-segan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan atau kelompoknya.

White Collar Crime merupakan persoalan yang sangat rumit di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, kasus-kasusnya telah banyak terjadi, dan akibatnya negara dirugikan milyaran rupiah. Akibat kerugian tersebut jelas dapat mengganggu/menghambat program pembangunan dan oleh karena itu juga merugikan masyarakat luas.

Akhir-akhir ini banyak kita dengar, baik melalui siaran Televisi, media massa dari berbagai koran maupun majalah, laporan-laporan yang disampaikan oleh para pejabat melalui seminar maupun simposium yang memberitahukan tentang kasus-kasus yang dilakukan/melibatkan golongan intelektual. Seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, tindak pidana suap, dan lain-lain.

Pada umumnya beberapa tindak pidana yang dicontohkan di atas dilakukan oleh mereka yang tergolong intelektual. Perbuatan itu bertujuan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain seperti kelompoknya atau atasannya, walaupun sebenarnya mereka menyadari, bahwa perbuatan yang dilakukan menyalahi peraturan serta dapat merugikan negara dan masyarakat. Teta-

pi karena didorong oleh faktor-faktor tertentu serta kepandaianya, mereka menjadi berani/tidak takut lagi. Seharusnya golongan intelektual dapat memberikan contoh/teladan yang baik kepada masyarakat luas, tetapi kadang-kadang justru sebaliknya, mereka memberikan contoh yang tidak baik.

Pengaruh White Collar Crime, negara akan mengalami kerugian yang tidak sedikit dan akibat kerugian tersebut dapat menghambat jalannya pembangunan serta secara tidak langsung membebani kepada masyarakat luas. Pengaruh bagi bangsa, dengan terhambat pembangunan jelas akan berakibat memperlambat laju pertumbuhan perekonomian bangsa, serta dapat menyebabkan masyarakat tidak akan mentaati norma hukum dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat. Hal ini bertentangan dengan tujuan pembangunan negara, prinsip/falsafah hidup bagi bangsa Indonesia dan pembinaan hukum dalam rangka penegakan hukum. Karena itu untuk menghindari pengaruh negatif dari White Collar Crime masih perlu ditingkatkan penghayatan keagamaan, pendidikan moral, penyuluhan hukum serta diambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku kejahatan yang tergolong kedalam tipe White Collar Crime, agar kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan negara, kepentingan masyarakat luas/umum tidak terus berlanjut.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

- a. White Collar Crime, sebagai salah satu kejahatan dalam hukum pidana, obyek yang akan dilakukan sudah direncanakan dengan rapi dan dilakukan secara bertahap. Para penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk mendeteksi, walaupun terungkap perbuatan pidana tersebut biasanya memakan waktu yang cukup lama.
- b. Pelaku White Collar Crime adalah orang-orang yang tergolong intelektual yang mempunyai status sosial terpendang dalam masyarakat, seperti pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, dan para tokoh masyarakat. Kejahatan yang mereka lakukan sehubungan dengan kekuasaan/jabatan yang mereka miliki/duduki, sehingga mereka dengan leluasa menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi dan atau kelompoknya, memeras penguasa-pengusaha (pungli).
- c. Di Indonesia dewasa ini banyak terungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh penjahat tipe White Collar Crime. Adapun faktor penyebab yang paling dominan adalah faktor moral dari para pelaku dan kerawanan kondisi sosial ekonomi.
- d. Perbedaan prinsipil antara kejahatan biasa dan kejahatan

yang dilakukan oleh mereka yang tergolong intelektual (tipe White Collar Crime) adalah terletak pada pelakunya, Kejahatan tipe White Collar Crime pelakunya bersetatus terpendang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, mereka melakukan kejahatan sehubungan dengan kekuasaan dan jabatan yang dipercayakan kepadanya atau karena telah mempunyai kemampuan keuangan yang sangat kuat.

- e. Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pejabat tipe White Collar Crime, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penyuapan, dan lain-lain tindak pidana yang berskala besar dan berdampak negatif bagi kehidupan negara dan bangsa.
- f. Munculnya White Collar Crime dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dalam hal ini dirugikan dalam hal keuangan dan sekaligus menghambat program pembangunan di segala bidang termasuk bidang Ipoeksosbudhankamnas. Bagi bangsa (masyarakat luas) dapat menghambat laju perekonomian bangsa, serta dapat merusakkan moral bangsa dan merusak citra kehidupan bangsa yang lain.

B. Saran

- a. Terhadap pelaku kejahatan tipe White Collar Crime haruslah di-

- tindak tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan diberikan ganjaran hukuman yang berat, dengan harapan agar dapat mencegah kemungkinan munculnya kasus-kasus yang baru yang lebih merugikan negara dan bangsa.
- b. Karena rapinya cara kerja dalam mengerjakan obyeknya, maka diperlukan pengawasan yang intensip dan diperlukan pejabat pengawas yang pandai dan jeli serta bermoral baik dan berdisiplin tinggi, agar dapat mengetahui penyelewengan-penyelewengan yang ada dan tidak terperangkap ikut membenarkan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan peraturan yang ada.
 - c. Dalam mengangkat seorang pejabat yang akan menduduki jabatan yang penting harus diperhatikan faktor moral dan agama di samping kemampuan melaksanakan tugas.
 - d. Upaya mengatasi kerawanan sosial ekonomi perlu mendapat penanganan secara khusus, sehingga celah-celah yang dapat dipergunakan oleh mereka yang memiliki status terpendang untuk melakukan kejahatan semakin kecil.
 - e. Tatakerja aparat penegak hukum harus terjalin secara terpadu dan perlu terus ditingkatkan

keahlian, ketrampilan serta kewibawaan para penegak hukum.

- f. Para pejabat dan penegak hukum harus dapat dijadikan contoh masyarakat luas, mereka harus lebih mengutamakan kewajiban daripada haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- B. Mardjono Reksodiputro, *Peranggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang 23-24 Nopember 1989.
- Frans Magnis, Suseno, 1986, *Kuasa Dan Moral*, PT Gramedia, Jakarta.
- G.A.A.J. Vander Heuvel, *Kejahatan Korporasi Ditinjau Dari Sudut Kriminologi (studi kasus di Negara-negara Eropa)*, Semarang 23-24 Nopember 1989.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Reserse Polri Sub Direktorat Reserse Ekonomi, *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Semarang 23-24 Nopember 1989.